

BAB II KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Bagian deskripsi konseptual ini mengkaji teori maupun konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa masalah penelitian, yaitu: teori damai, konsep budaya damai, konsep pendidikan perdamaian, konsep pembangunan perdamaian, teori konflik, teori kekerasan, dan teori identitas sosial.

2.1.1 Teori Konflik

Konflik adalah keadaan dimana adanya sebuah kontradiksi dalam sebuah hal yang tercipta ketika tiga aspek tertentu bertemu di satu waktu. Tiga aspek itu adalah *attitude* (sikap), *behavior* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi).¹ Ichsan Malik menjelaskan bahwa terdapat lima asumsi konflik, yakni:

1. Konflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Asumsi ini lahir dari fakta bahwa manusia dilahirkan berbeda-beda sehingga perbedaan yang tidak dapat dihadapi secara baik lah yang dapat menimbulkan konflik.
2. Konflik dapat dianalogikan sebagai drama yang memiliki aktor, panggung, dan skenario. Aktor adalah pelaku konflik. Panggung merupakan media untuk mengekspresikan peran dari aktor. Skenario adalah bagaimana alur bagaimana aktor dan panggung dapat dimanfaatkan, serta dapat bersifat struktural maupun kultural

¹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (Oslo: Sage Publication, 1996), hlm. 72-73.

3. Konflik selalu mempunyai dua sisi, menciptakan perubahan, dan dipengaruhi budaya secara inheren. Konflik membawa potensi risiko dan potensi manfaat, tergantung bagaimana cara memandang dan memanfaatkan konflik tersebut.
4. Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya. Konflik mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang. Budaya juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa seseorang pada konflik.
5. Merujuk pada fenomena konflik antarkomunitas. Konflik dapat dianalogikan dengan kebakaran pada suatu hutan yang gundul, terdapat daun kering sebagai sumber (*source*), api sebagai pemicu terjadinya kebakaran (*trigger*), dan angin sebagai faktor yang mempercepat terjadinya kebakaran (*accelerator*).²

Transformasi konflik adalah sebuah proses menghadapi sebuah perselisihan, masalah sosial, atau perbedaan ideologi dengan tujuan untuk membentuk kembali konflik menjadi sebuah komponen yang dapat dikenali, melunakkan perselisihan, mengarahkan perselisihan melalui komunikasi yang memiliki tujuan, melahirkan sebuah iklim damai, dan menempatkan pondasi untuk meresolusi konflik dengan tujuan mencapai solusi jangka panjang.³

2.1.2 Teori Kekerasan

Konflik yang tidak mampu bertransformasi nantinya dapat menjadi kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan, salah satunya, diartikan sebagai “perbuatan seseorang atau kelompok orang yang

² Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 10-13.

³ Candice C. Carter dan Linda Pickett, “Youth Literature for Peace Education,” (New York: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 150.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”⁴ Kekerasan, dalam pengertian agresi Erich Fromm, dapat dikategorikan sebagai bentuk “agresi jahat”, yakni kecenderungan khas manusia untuk merusak.⁵ Fromm menyebut kekerasan merusak sebagai kedestruktifan, dimana salah satunya bersifat kesumat (*vengeful destructiveness*) yang merupakan reaksi spontan terhadap siksaan yang amat sangat dan sewenang-wenang kepada individu atau kelompok.⁶ Contohnya adalah tawuran antar kelompok sebagai bentuk balas dendam karena sebelumnya salah satu kelompok melakukan penyerangan.

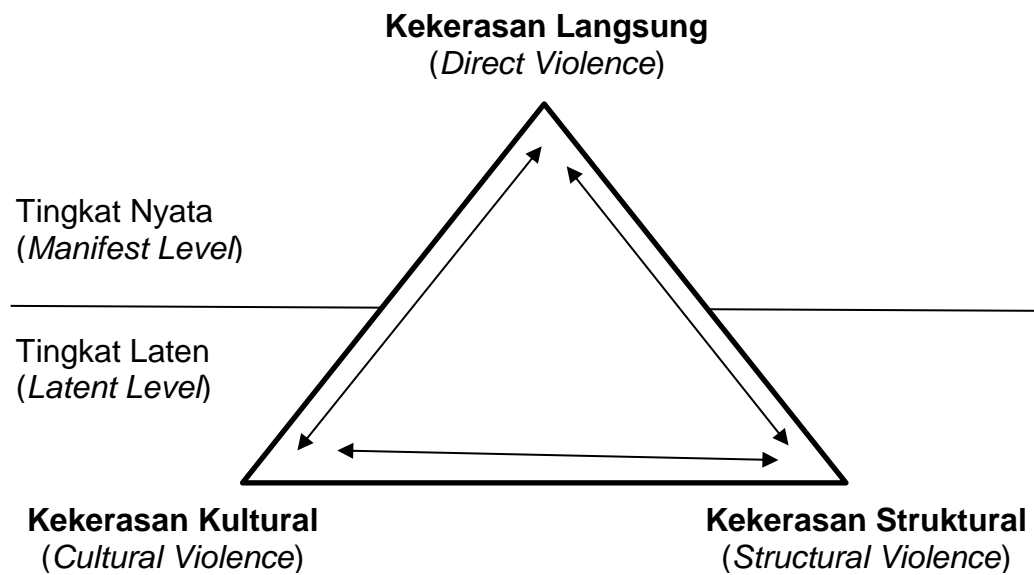
Galtung membagi kekerasan dalam tiga bentuk, yakni kekerasan langsung (*direct*), struktural (*structural*), dan budaya (*cultural*).⁷ Pertama, kekerasan langsung muncul dalam berbagai bentuk, seperti membunuh, melukai, menyerang, dan bentuk lain yang dapat membahayakan kebutuhan dasar manusia. Kedua, kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang berasal dari hasil eksploitasi dan represi dimana sebagian pihak dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ketiga adalah kekerasan budaya, yakni situasi ketika kedua bentuk kekerasan (langsung dan struktural) telah melekat dalam masyarakat sehingga dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Keras”, dalam <https://kbbi.web.id/keras>, diakses pada 11 Agustus 2018.

⁵ Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 385.

⁶ *Ibid.* hlm. 390.

⁷ Michelle Cromwell dan William B. Voegle, *Nonviolent Action and Building a Culture of Peace* dalam “Handbook on Building Cultures of Peace.” (New York: Springer, 2009), hlm. 233.



Gambar 2.1 Segitiga Kekerasan Galtung

Menambahkan pengelompokan jenis kekerasan, Toh Swee-Hin dan Virginia Cawagas menjabarkan setidaknya ada empat jenis kekerasan dengan empat tingkatan yang berbeda, yakni tingkat perorangan, komunitas antar perorangan, nasional, dan global.

Tabel 2.1 Tipologi Kekerasan

Jenis Level	Langsung (<i>Direct / Physical</i>)	Struktural (<i>Structural / Economic, Political</i>)	Sosial Budaya (<i>Socio-Cultural / Psychological</i>)	Ekologis (<i>Ecological</i>)
Perorangan	Bunuh Diri, Penyalahgunaan Narkoba	Ketidakberdayaan	Alienasi, Rendah Diri	Konsumsi Berlebihan
Komunitas Antar Perorangan	Kekerasan Domestik, Kriminalitas	Ketidakadilan Lokal, Kemiskinan, Kelaparan	Prasangka, Dominasi Budaya, Rasisme,	Konsumsi Berlebihan, Polusi

			Seksisme, Intoleransi Beragama	
Nasional	Ketidakadilan Skala Nasional, Kemiskinan, Kelaparan	Ketidakadilan Skala Nasional, Kemiskinan, Kelaparan	Prasangka, Dominasi Budaya, Rasisme, Seksisme, Intoleransi Beragama	Konsumsi Berlebihan, Polusi, Perang Kimia dan Biologis, Radiasi Nuklir
Global	Perang Konvensional, Pelanggaran HAM	Ketidakadilan Skala Global, Kemiskinan, Kelaparan	Prasangka, Dominasi Budaya, Rasisme, Seksisme, Intoleransi Beragama	Konsumsi Berlebihan, Polusi, Perang Kimia dan Biologis, Radiasi Nuklir

Sumber: Loreata Navarro-Castro & Jasmin Nario-Galace. *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*, (Quezon City: Center for Peace Education, 2010), hlm. 22.

2.1.3 Teori Identitas Sosial

Menurut teori identitas sosial atau *social identity theory* (SIT), masyarakat cenderung mengklasifikasikan diri mereka dan orang lain ke dalam berbagai kategori yang berbeda yang diakibatkan oleh ikatan emosional terhadap kelompok yang menjadi bagiannya.⁸ Terdapat tiga komponen dasar dalam SIT, yaitu: *concept and bases of identity*, *activation of identity and identity salience*, dan *cognitive and motivational process*.⁹ Dalam teori sosial

⁸ Henri Tajfel dan John Turner, "The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour", *Social Science Information*, Vol. 13 (65), 1974, hlm. 69.

⁹ Jes Zogelman. "The Social Identity Theory: Explanation of Gang Member as Terrorist in United States," *Honors Seminar: Terrorism*, 2011, hlm. 2-3.

identitas, konsep identitas dimaknai sebagai kelompok. Identitas terbentuk ketika seseorang menganggap dirinya tergabung dengan kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang sama antar sesama anggota kelompok. Dalam upaya membangun identitas sosial, terbagi ke dalam dua jenis: *self categorization* dan *self comparison*. *Self categorization* ialah proses dimana adanya proses kategorisasi terhadap dirinya sendiri sebagai sebuah obyek yang berada dalam struktur masyarakat. Sementara *self comparison* yaitu ketika mereka mengkategorisasikan diri mereka dalam sebuah kelompok. Maka orang yang berada di luar kelompoknya dianggap berbeda. Sementara itu, *Bases of identity* merupakan suatu keselarasan sebuah kelompok dalam melihat sebuah persepsi dan keputusan dari kelompok tersebut.

Komponen selanjutnya yaitu *Activation of identity and identity saliance*. *Saliency* merupakan pengaktifasian identitas seseorang melalui situasi yang berkembang dan berfokus pada karakteristik dari situasi tersebut. Pada komponen ini, seseorang yang tergabung dalam kelompok dituntut untuk mampu mengambil keputusan dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tahap ini, anggota kelompok akan dianggap baik apabila mereka melakukan tindakan yang dianggap baik bagi kelompok.

Komponen terakhir yaitu *cognitive and motivational process*. Sebetulnya, komponen ini memiliki kesamaan aspek dengan komponen-komponen sebelumnya. Namun, komponen ini menunjukkan perasaan seseorang yang lebih dalam terhadap kelompoknya. Dalam tahap *cognitive* terjadi proses *depersonalization*, yaitu dimana jati diri seseorang telah hilang dan sepenuhnya melebur dengan *gang* atau kelompoknya. Sementara proses *motivational* berfokus pada hal yang berkesinambungan dan penguatan harga diri. Hal ini akhirnya membuat individu bertindak dengan tujuan untuk mendapatkan evaluasi terhadap dirinya sendiri sebagai anggota kelompok. Pada tahap ini, seseorang akan bertindak sesuai dengan kelompoknya.

Sherif dan Sherif menjelaskan bahwa konflik antarkelompok disebabkan karena adanya kegagalan dalam kerja sama dan adanya kompetisi yang manipulatif, ditambah dengan adanya stereotip.¹⁰ Stereotip ini menyebabkan terciptanya *ingroup* dan *outgroup* (kelompok kami dan kelompok mereka) yang kemudian seiring berjalannya waktu terbentuk sebuah kecenderungan dalam memandang kelompok lain yang biasanya bersifat negatif.

Janis I.L. menjabarkan ada delapan gejala lahirnya *groupthink* atau sebuah pemikiran yang selalu membenarkan kelompoknya sendiri, yakni:

1. Adanya kecenderungan untuk selalu menjaga dan mempertahankan apa yang benar dan apa yang salah.
2. Munculnya pemikiran bahwa kelompoknya tidak akan dapat dikalahkan.
3. Munculnya justifikasi terhadap setiap keputusan yang diambil dimana biasanya keputusan tersebut selalu dianggap benar.
4. Lahirnya stereotip atau pandangan negatif terhadap kelompok lain.
5. Adanya tekanan agar seluruh anggota kelompok selalu mengikuti keputusan kelompok atau dengan kata lain kritis tidak diperkenankan.
6. Kelompok selalu berada dalam konsensus meskipun secara pribadi tidak setuju.
7. Kelompok mulai khawatir akibat keraguan-keraguannya, sehingga memunculkan perasaan kurang semangat dalam melakukan sesuatu.
8. Adanya penjaga pikiran yakni yang bertugas untuk memilah informasi yang masuk ke dalam kelompok.¹¹

Montessori menjelaskan bahwa kepatuhan buta atau kewajiban untuk mengikuti perintah tanpa memikirkan benar atau salahnya dapat menimbulkan kesalahan dan perbuatan tidak baik di dalam masyarakat.¹² Hal tersebut dapat melahirkan ketidakacuhan dan menjadi kesempatan bagi sebagian orang

¹⁰ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 40.

¹¹ *Ibid*, hlm. 40-41.

¹² Borislava Manojlovic, *Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities*, (Swiss: Palgrave Macmillan, 2018), hlm. 111.

untuk memanfaatkan hal tersebut dalam mencari para pengikut yang tidak memiliki kemampuan untuk menanyakan informasi apa yang diberikan dan perintah apa yang dijalankan.

2.1.4 Teori Damai

Johan Galtung berpendapat bahwa damai adalah ketiadaan kekerasan dalam bentuk apapun.¹³ Hanya saja, definisi ini berorientasikan kekerasan karena untuk mengetahui sebuah bentuk damai, diperlukan pengetahuan tentang sebuah bentuk kekerasan. Galtung menjelaskan bahwa damai adalah sebuah bentuk transformasi konflik yang bersifat kreatif dan tanpa kekerasan. Definisi ini berorientasikan konflik karena untuk mengetahui sebuah bentuk damai, diperlukan pengetahuan tentang konflik dan bagaimana konflik tersebut dapat bertransformasi secara kreatif dan tanpa kekerasan.

Galtung membagi damai menjadi dua, yakni damai positif (*positive peace*) dan damai negatif (*negative peace*).¹⁴ Damai positif adalah keadaan dimana keinginan alami pikiran dan masyarakat muncul, yakni adanya sebuah harmoni, keadilan, kesejahteraan, dan lainnya. Damai positif juga dapat diartikan sebagai adanya sebuah keadilan sosial. Damai negatif adalah situasi dimana tidak adanya perang dan tidak adanya jenis konflik yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Terminologi ini tidak memiliki definisi yang positif. Galtung menawarkan bagaimana pendekatan damai yang efektif, yakni:

1. Damai harus menjadi fokus, yakni hubungan antar pihak yang berkonflik dengan tidak menganggap pihak lain sebagai ancaman. Sebuah tujuan yang sama secara otomatis akan menciptakan tingkat damai yang tinggi, sedangkan perbedaan tujuan yang menyebabkan konflik, dihadapi dengan cara damai.
2. Damai bergantung pada transformasi konflik antar pihak yang berkonflik dimana konflik yang tidak mampu bertransformasi akan

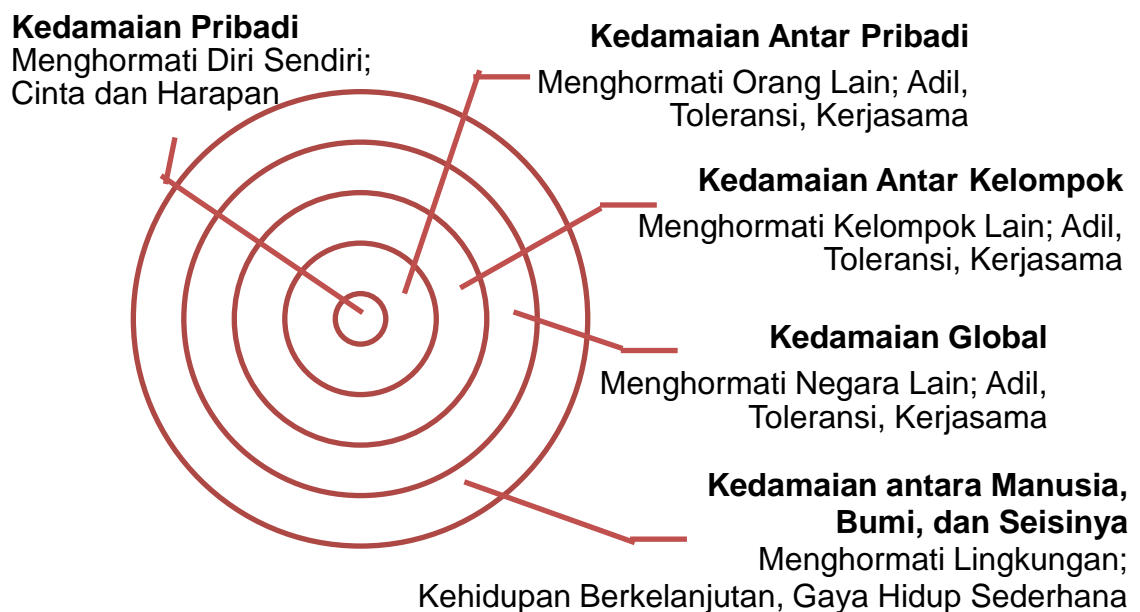
¹³ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (Oslo: Sage Publication, 1996), hlm. 9.

¹⁴ Charles Weibel dan Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 14.

menjadi kekerasan, sehingga transformasi konflik harus dengan menggunakan pendekatan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik kembali di kemudian hari.

3. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari transformasi konflik, dibutuhkan sebuah kreatifitas yang melebihi tujuan yang telah dibuat, yakni pendekatan transendensi (*transcend*).
4. Pendekatan transendensi berbeda dengan pendekatan melalui negosiasi dan kompromi, yakni dengan melakukan dialog yang mendalam satu per satu dengan para pihak yang berkonflik untuk mendapatkan hasil akhir yang kreatif.
5. Pendekatan ini bersifat menyeluruh (holistik) dengan model proses yang dinamis.¹⁵

Perilaku damai dimulai dari diri sendiri dan terus naik menuju tingkatan berikutnya, seperti damai dengan orang lain, damai dengan kelompok lain, damai secara global, hingga damai dengan bumi dan seisinya.



Gambar 2.2 Tingkatan Damai

Sumber: Loreata Navarro-Castro & Jasmin Nario-Galace. *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*, (Quezon City: Center for Peace Education, 2010), hlm. 21.

¹⁵ Charles Webel dan Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 14.

2.1.5 Konsep Budaya Damai

Selama masih ada kehidupan, konflik akan terus selalu ada. Dapat dikatakan bahwa konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak, namun dapat ditransformasikan sehingga konflik tidak membesar. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam Resolusi 53/243 Tahun 1998 tentang *Declaration on a Culture of Peace*, mendefinisikan budaya damai sebagai bentuk nilai, sikap, dan perilaku yang menolak kekerasan dan berusaha untuk mencegah konflik dengan cara menanggulangi akar permasalahan demi menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi.¹⁶ Negara dan masyarakat harus mampu bekerjasama untuk mempromosikan budaya damai tersebut melalui pendidikan; pembangunan berkelanjutan; hak asasi manusia; kesetaraan gender; partisipasi demokrasi; pengetahuan, toleransi, dan solidaritas; kebebasan informasi; dan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁷

Dalam budaya damai, orang-orang berperilaku dengan tujuan untuk mempromosikan rasa saling peduli dimana perilaku tersebut tercermin dalam norma dan nilai dalam masyarakat.¹⁸ Vollhardt, Migacheva, dan Tropp berpendapat bahwa kepaduan sosial (*social cohesion*) sangat penting untuk menciptakan sebuah budaya damai bila masyarakat tersebut memiliki tingkat toleransi terhadap perbedaan.¹⁹ Toleransi akan merubah cara pendekatan terhadap konflik yang semula menggunakan kekerasan bertransformasi menjadi pendekatan tanpa kekerasan. Pendekatan terhadap konflik melalui perilaku tanpa kekerasan dianggap mampu berkontribusi dalam membangun

¹⁶ United Nation General Assembly Resolution 53 / 243, *Culture of Peace*, 1998.
<http://www.un-documents.net/a53r243a.htm>

¹⁷ Joseph de Rivera (ed), *Handbook on Building Cultures of Peace*, (New York: Springer, 2009), hlm. 2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁹ Vollhardt, Migacheva, dan Tropp, *Social Cohesion and Tolerance for Group Differences* dalam "Handbook on Building Cultures of Peace." (New York: Springer, 2009), hlm. 149.

dan mempertahankan budaya damai.²⁰ Sikap tanpa kekerasan dapat mempromosikan norma sosial yang menjauhkan diri dari kekerasan, serta mampu membangun rasa saling percaya antar individu dan kelompok.

Pembangunan budaya damai dapat dilakukan melalui pendidikan sejarah untuk mengurangi keinginan melakukan konflik dan prasangka negatif terhadap kelompok lain (*out-group*) dengan meningkatkan rasa percaya diri kelompok (*in-group*) melalui pengetahuan tentang keunikan budaya yang dimiliki kelompok tersebut.²¹ Kurikulum sejarah yang diberikan harus bermaterikan sejarah yang positif, seperti pemahaman terhadap visi dan misi awal terbentuknya kelompok, pencapaian-pencapaian yang pernah ditorehkan, hingga tokoh-tokoh inspiratif yang tergabung dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, diharapkan aura positif akan terbentuk dalam kelompok dan intensitas kebencian atau prasangka terhadap kelompok lain akan berkurang.

2.1.6 Konsep Pembangunan Perdamaian

Terminologi pembangunan perdamaian pertama kali dikenalkan oleh Johan Galtung pada tahun 1970-an sebagai bentuk penciptaan sebuah struktur untuk mempromosikan damai berkelanjutan dengan cara menemukan akar masalah dari sebuah konflik kekerasan.²²

²⁰ Michelle Cromwell dan William B. Voegelé, *Nonviolent Action and Building a Culture of Peace* dalam "Handbook on Building Cultures of Peace." (New York: Springer, 2009), hlm. 238.

²¹ Karina V. Korostelina, *Promoting Culture of Peace through History Education* dalam "Forming a Culture of Peace: Reframing Narratives of Intergroup Relations, Equity, and Justice." (New York: Palgrave Macmillan, 2012), hlm. 104-105.

²² Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, a Peacebuilding," *Impact of Science on Society*, Vol. 26 (1/2), 1976, hlm. 110.

Tabel 2.2 Struktur Damai: Sebuah Saran

<i>Social Relations</i>	<i>Structures</i>	Infrastrucure
<i>Vertical</i>	1. <i>Equity</i> 2. <i>Entropy</i>	
<i>Zero</i>	3. <i>Symbiosis</i>	
<i>Horizontal</i>	4. <i>Broad Scope</i> 5. <i>Large Domain</i> 6. <i>Superstructure</i>	

Sumber: Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, a Peacebuilding," *Impact of Science on Society*, Vol. 26 (1/2), 1976, hlm. 111

Saran yang diberikan oleh Galtung tentang "struktur perdamaian" dimulai dari, pertama, adanya keadilan (equity) dimana tidak ada pihak yang dieksploitasi. Kedua, adanya entropi atau energitas, yang berarti partisipasi dalam menciptakan perdamaian tidak hanya di tingkat pemerintah dan elit saja, melainkan melibatkan seluruh pihak. Ketiga, simbiosis yang berupa interdependensi. Keempat, lingkup luas yang berarti meliputi tidak hanya di bidang ekonomi saja. Kelima, domain luas, dimana pihak yang terlibat harus lebih dari dua atau tiga pihak. Terakhir, super-struktur, yakni keterlibatan semua pihak harus lebih menjadi transnasional, seperti layaknya Uni Eropa dimana organisasi tersebut tidak hanya sekedar melakukan konferensi tetapi lemah di bidang kesekretariatan, melainkan mampu menjadi organisasi transnasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeskripsikan pembangunan perdamaian sebagai tindakan mencegah terulangnya permusuhan, membangun kembali interaksi ekonomi dan sosial, serta memfasilitasi sebuah resolusi. Sekretaris Jenderal PBB, Boutros-Ghali dalam dokumen PBB A/47/277 *An Agenda for Peace* Tahun 1992, menegaskan pentingnya pembangunan perdamaian paska konflik sebagai sebuah struktur yang

memperkuat perdamaian dengan tujuan untuk mencegah terulangnya konflik.²³ Menegaskan pendapat Boutros-Ghali, Coate dan Puchala juga mendeskripsikan pembangunan perdamaian sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan sumber masalah di bidang sosial dan ekonomi.²⁴ Intinya adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan konflik dan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, akar atau sumber masalah harus terlebih dahulu ditemukan dan dihilangkan.

Malitza menyebutkan pembangunan perdamaian adalah sebuah interaksi yang dengan sengaja diciptakan secara sistematis untuk membentuk sebuah kondisi dimana konflik mustahil untuk terulang kembali.²⁵ Mantan Perdana Menteri Australia, Gareth Evans, mendefinisikan pembangunan perdamaian sebagai sebuah kumpulan strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa perselisihan, konflik bersenjata dan bentuk krisis lainnya tidak terjadi.²⁶ Bila sekalipun konflik terlanjur terjadi, hal tersebut tidak akan terulang kembali, setidaknya ke dalam dua kategori: rezim internasional dan pengukuran di dalam negeri. Rezim internasional meliputi hukum internasional, norma-norma, perjanjian, secara global dan dirancang untuk menekan ancaman terhadap keamanan, mempromosikan kepercayaan dan menciptakan kerangka dasar untuk dialog dan kerjasama. Di lingkup pengukuran di dalam negeri, pembangunan perdamaian mengacu pada upaya nasional dan internasional terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan institusi, dan penciptaan kondisi di dalam negara yang mampu membuat negara-negara untuk tetap stabil.

²³ Boutros Boutros-Ghali, "An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping," *Report of the Secretary-General*, (New York: United Nations, 1992).

²⁴ A.B. Fetherston, *Towards a Theory of United Nations Peacekeeping*, (London: Macmillan Press LTD, 1994), hlm. 132.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Fen Osler Hampson, "Can Peacebuilding Work?", *Cornell International Law Journal*, Vol. 30 (3), 1997, hlm. 703.

2.1.7 Konsep Pendidikan Perdamaian

Salah satu cara untuk menciptakan perdamaian adalah melalui pendidikan perdamaian. Manusia dapat mempelajari pelajaran tentang damai melalui pendidikan formal dan informal berupa observasi dan interaksi di kehidupannya sehari-hari.²⁷ Instruksi informal dapat muncul melalui penanaman pengetahuan dan kemampuan yang dapat menunjang proses penciptaan perdamaian.

Nilai penting dalam pendekatan pendidikan perdamaian menurut pandangan Gandhi adalah untuk menciptakan empati, kepedulian, rasa kebersamaan, kerjasama, dan toleransi sehingga pendidikan perdamaian harus berfokus pada politik, budaya, sosial, ekonomi, bahasa, agama, dan aspek-aspek sosial lainnya yang berkontribusi dalam toleransi dan menghilangkan kekerasan, penindasan, eksploitasi, dan perang.²⁸ Gandhi juga menekankan bahwa penting untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan damai, tanpa menciptakan konflik baru.

Dalam melaksanakan metode pendidikan perdamaian, terdapat tiga komponen penting, yakni sifat alami kurikulum yang harus berhubungan dengan nilai kemanusiaan, peran dan orientasi pengajar, dan faktor yang berhubungan dengan komunitas.²⁹ Pendidikan perdamaian harus mampu mengajarkan tentang nilai-nilai perbedaan, mengapa perbedaan ada, dan bagaimana cara menyikapi perbedaan. Dalam mengajarkan nilai-nilai perdamaian, pengajar atau orang yang memiliki peran serupa, harus memiliki kebebasan dalam berpikir tanpa mengalami tekanan dari pihak tertentu.

²⁷ Candice C. Carter dan Linda Pickett, "Youth Literature for Peace Education," (New York: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 6.

²⁸ Douglas Allen, "Mahatma Gandhi on Violence and Peace Education." *Philosophy East and West: Ninth East-West Philosophers' Conference*, Vol. 57 (3), 2007, hlm. 303.

²⁹ John W. Friesen, "A Model for Peace Education." *Peace Research Canadian Mennonite University*, Vol. 4 (3), 1972, hlm. 22-23.

Pendidikan perdamaian juga tidak mampu berjalan secara efektif tanpa dukungan eksternal, terutama yang bergerak di tingkat akar rumput.

Pendekatan melalui pendidikan yang ditawarkan oleh Montessori adalah pendidikan yang kreatif dan inovatif dimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat agar terjadi perubahan budaya, yakni dari budaya konflik menuju budaya damai.³⁰ Contohnya adalah dengan mulai mempertanyakan status quo, mencari kebenaran, dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan ke generasi mendatang. Bersama pendekatan kreatif, kini teknologi juga memiliki peran dalam mempromosikan damai berkelanjutan.³¹ Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan kemampuan manusia dalam melakukan akses dan membagikan informasi, bahkan informasi terbatas sekalipun. Teknologi terbaru menjadi esensial dalam menciptakan sebuah perpustakaan virtual dimana seluruh informasi yang relevan mengenai konflik dan bagaimana proses menciptakan perdamaian.

Teknologi kini menjadi penting dalam menyebarkan pendidikan perdamaian karena teknologi mampu melakukan pemberdayaan di tingkat masyarakat secara besar dan dengan lingkup yang luas dengan waktu dan kemampuannya masing-masing. Penggunaan teknologi dalam pendidikan perdamaian juga mampu menyediakan berbagai macam alat dan tempat yang mampu mengambil berbagai macam jenis informasi serta sebagai alat untuk menciptakan inovasi baru dalam mempromosikan perdamaian.

³⁰ Borislava Manojlovic, *Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities*, (Swiss: Palgrave Macmillan, 2018), hlm. 112

³¹ *Ibid*, hlm. 122-123.

2.1.8 Teori Rekonsiliasi

Menurut Bar-Tal, rekonsiliasi dapat menjadi alat untuk membangun sebuah budaya damai.³² Rekonsiliasi dapat terbentuk dari adanya pengakuan dan penerimaan antar kelompok, kepentingan dan tujuan yang sama sebagai upaya menciptakan hubungan yang damai, adanya rasa percaya satu dengan lain, dan sensitivitas terhadap kepentingan dan keperluan kelompok lain. Hanya saja, rekonsiliasi tidak serta merta langsung dapat berubah menjadi budaya damai. Dalam perspektif psikologis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

1. *Mutual Knowledge.*

Kelompok yang memiliki persaingan harus memiliki pengetahuan tentang satu sama lain. Pengetahuan tersebut dapat berupa budaya, agama, politik, hingga sejarah. Pengetahuan ini menjadi penting untuk membangun budaya damai karena informasi yang diterima mampu menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai.

2. *Mutual Acceptance.*

Kedua kelompok harus mampu menerima satu sama lain secara personal. Dengan saling menerima, diharapkan akan tercipta sebuah hubungan pertemanan dan kooperatif. Kunci untuk memperoleh *mutual acceptance* adalah dengan menumbuhkan dan mempertahankan hubungan saling percaya.

3. *Mutual Understanding.*

Selain mengetahui dan menerima, kedua pihak yang berkonflik perlu untuk memahami satu sama lain, yakni dengan cara mengembangkan rasa empati dan sensitivitas terhadap keinginan, keperluan, tradisi, dan pengalaman kelompok lain. Pemahaman ini nantinya akan mampu mencegah konflik karena kedua belah pihak mengetahui bahwa hubungan damai di antara mereka dapat rusak jika konflik sampai terjadi.

³² Daniel Bar-Tal, *Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace* dalam "Handbook on Building Cultures of Peace." (New York: Springer, 2009), hlm. 368

4. *Respect for Differences and Focus on Commonalities.*

Budaya damai berarti menghormati pluralisme dan perbedaan, serta menekankan pendekatan komunal dan tujuan bersama. Seluruh pihak perlu untuk mencari hal-hal tersebut dengan menghargai identitas pihak lain sehingga pihak lain tidak perlu merasa terancam akan kehilangan identitasnya.

5. *Development of Cooperative Relations.*

Pengembangan terhadap hubungan kerjasama antar kelompok merupakan salah satu aspek penting dalam budaya damai. Kerjasama yang dimaksud memiliki lingkupan yang luas, seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan.

6. *Valuing Peace.*

Penting bagi damai untuk menjadi sebuah nilai tertinggi dimana seluruh pihak harus melihat hal tersebut sebagai sebuah nilai penting yang harus didapatkan bagaimanapun caranya. Dengan demikian, seluruh pihak akan melihat damai sebagai sesuatu yang bukan tidak mungkin untuk dicapai.

7. *Mechanisms for Maintaining Peace.*

Budaya damai memiliki peran penting dalam mempertahankan perdamaian. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan bantuan dari berbagai institusi, organisasi, dan lainnya dimana mereka memiliki tujuan yang sama yakni membangun dan mempertahankan hubungan damai. Pengembangan budaya damai juga dapat dilakukan melalui pendidikan perdamaian yang dapat diajarkan kepada generasi muda. Selain itu, media massa juga memiliki peran dan misi penting dalam menjaga perdamaian, seperti melalui literasi dan film.³³

³³ Daniel Bar-Tal, *Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace* dalam "Handbook on Building Cultures of Peace." (New York: Springer, 2009), hlm. 368

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

2.2.1 Penelitian oleh Anthony King (2001), “Violent Pasts: Collective Memory and Football Hooliganism.”

Selanjutnya, terkait dengan hubungan antara ingatan bersama (*collective memory*) dalam membentuk hooliganisme di sepakbola, Anthony King (2001) dalam jurnalnya berjudul “*Violent Pasts: Collective Memory and Football Hooliganism*” menjelaskan tentang bagaimana ingatan bersama dapat menjadi sebuah alat untuk membentuk solidaritas dalam sebuah kelompok sepakbola. Ingatan bersama ini biasanya berasal dari narasi tentang pengalaman yang berhubungan dengan tindak kekerasan untuk mendapatkan sebuah status superioritas dari kelompok lain.

Pembentukan ingatan bersama berawal dari diskusi tentang perkelahian dan kekerasan yang pernah dialami oleh sebuah kelompok. Diskusi ini dianggap penting untuk menumbuhkan rasa solidaritas melalui pengertian bersama tentang perkelahian terdahulu demi eksistensi kelompok, serta mencari kebanggaan dan kehormatan dalam kemampuan berkelahi. Pengaruh dari anggota kelompok dengan status yang lebih tinggi di kelompok tersebut dapat memperkuat terbentuknya ingatan bersama.

Ketika anggota kelompok telah menyetujui ingatan bersama tentang sebuah kejadian dengan versi yang sama, maka hal tersebut mampu menjaga solidaritas kelompok. Hanya saja, solidaritas kelompok tidak dapat terjadi bila ingatan tentang sebuah kejadian tersebut ditafsirkan secara berbeda di setiap individu. Selain itu, agar ingatan bersama tersebut tidak hilang dari masing-masing individu, masa kelompok harus terus melakukan diskusi akan hal itu secara berkala.

Penelitian ini menjelaskan bahwa ingatan bersama yang biasanya tentang perkelahian dan kekerasan di masa lalu dapat menjadi acuan perilaku

kelompok di masa depan. Hal ini dikarenakan ingatan bersama tersebut telah menjadi perasaan bersama di setiap masing-masing individu, sehingga tidak terjadi perbantahan terhadap aksi yang dilakukan kelompok tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kelompok yang telah disepakati bersama melalui ingatan bersama menjadi acuan bagi kelompok hooligan untuk melakukan tindak kekerasan di masa depan.

2.2.2 Penelitian oleh Jamie Cleland dan Ellis Cashmore (2014), “Fans, Racism and British Football in the 21st Century: The Existence of a ‘Colour-Blind’ Ideology.”

Salah satu perilaku yang menjadi sumber konflik antar kelompok suporter, menurut Cleland dan Cashmore (2014) dalam jurnal “*Fans, Racism and British Football in the 21st Century: The Existence of a ‘Colour-Blind’ Ideology*” adalah rasisme. Dari penelitian yang dilakukan oleh keduanya melalui survei acak secara daring ke 2.500 responden, disimpulkan bahwa rasisme dalam sepakbola di Inggris masih dapat ditemukan aksi rasisme terhadap pemain dan suporter. Cleland dan Cashmore berargumentasi sekalipun telah dibentuk organisasi anti-rasisme seperti *Kick-It-Out* dan himbauan untuk mengurangi nyanyian rasis secara berlebihan, rasisme di dalam stadion masih sering terjadi akibat adanya *colour-blind ideology* di tubuh Asosiasi Sepakbola Inggris (FA). Hasilnya adalah pendekatan yang masih bersifat umum meskipun setiap kasus rasisme memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya korban adalah warga kulit putih, hitam, ataupun Asia.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggunaan sosial media menjadi penting dalam penyebaran ucapan rasisme, terutama terhadap pemain. Beberapa korban rasisme melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan lainnya memilih untuk menghapus komentar-komentar negatif

tersebut. Jumlah ujaran rasisme yang tidak sedikit itu tetap tidak membuat FA melakukan tindakan efektif untuk menguranginya. Peneliti berargumentasi bahwa Inggris merupakan salah satu negara yang multikultur di berbagai aspeknya, kecuali di ranah sepakbola. Demi mewujudkan multikulturalisme di sepakbola, FA seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih berat lagi bagi pelaku rasisme. Selain itu, rencana jangka panjang juga diperlukan yakni berupa pendidikan multikultur dimulai di tingkat sekolah dan berbagai organisasi lainnya.

Pelajaran yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah media sosial memainkan peran penting dalam melakukan penyebaran tentang suatu hal, baik hal negatif maupun positif. Bila dihubungkan dengan fenomena perilaku negatif suporter, maka media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk melawan perilaku tersebut. Media sosial dapat digunakan untuk mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian, sesuai dengan yang disebutkan dalam konsep pendidikan perdamaian. Terlebih, pengguna media sosial di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar dan teraktif di dunia. Bila pesan-pesan perdamaian tersebut terus menerus digaungkan, maka bukan tidak mungkin para pengguna media sosial akan mengikuti aktivitas tersebut.

2.2.3 Penelitian oleh Martin Winands dan Andreas Grau (2016), “Socio-Educational Work with Football Fans in Germany: Principles, Practice and Conflicts.”

Salah satu penelitian terdahulu adalah penelitian oleh Martin Winands dan Andreas Grau (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “*Socio-Educational Work with Football Fans in Germany: Principles, Practice and Conflicts*” menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merubah pandangan tentang sepakbola dan perilaku suporter sepakbola adalah dengan

membentuk sebuah institusi berbasis suporter yang berfokus pada *socio-educational work*. Komunitas sepakbola yang berisikan klub, polisi, dan suporter telah sepakat bahwa proyek ini penting dalam menangani tindak penyimpangan, kekerasan, dan diskriminasi oleh kelompok suporter. Proyek ini dimulai dengan membangun rasa saling percaya antar kelompok suporter dimana anggota *fan project* berperan sebagai mediator dan konsultan, contohnya ketika berhadapan dengan polisi, klub, maupun pengadilan. Permasalahan yang dihadapi dari proyek ini adalah kualitas anggota yang dihasilkan. Oleh karenanya diperlukan pelatihan spesial guna meningkatkan kualitas tersebut.

Dari penelitian ini dapat diambil pelajaran bahwa perilaku suporter, baik di dalam maupun di luar pertandingan, dapat dirubah yakni dengan melakukan pengajaran tentang pendidikan perdamaian secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bahwa agar program pendidikan perdamaian suporter sepakbola dapat dilakukan bila seluruh pemegang kepentingan bekerjasama. Hal ini juga sesuai dengan teori pembangunan perdamaian Johan Galtung yang menjelaskan bahwa perdamaian dapat tercapai bila seluruh elemen yang terlibat aktif dalam upaya pembangunan perdamaian.

2.2.4 Penelitian oleh Clifford Stott, James Hoggett, dan Geoff Pearson (2012), “Keeping the Peace: Social Identity, Procedural Justice and the Policing of Football”.

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan perilaku kelompok suporter sepakbola. Penelitian yang dilakukan oleh Clifford Stott, James Hoggett, dan Geoff Pearson (2012) dalam jurnal berjudul “*Keeping the Peace: Social Identity, Procedural Justice and the Policing of Football*” mengambil sampel salah satu kelompok suporter sepakbola yang cukup disegani di Inggris, yakni

suporter klub Cardiff City Football Club. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberadaan dan ketidakberadaan konflik kolektif dalam sebuah kerumunan acara yang berkaitan dengan sepakbola.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa suporter Cardiff City dikenal sebagai suporter garis keras atau *hooligans* dimana kelompok suporter ini memiliki sebuah komitmen untuk melindungi satu sama lain yang terkadang terlihat dalam bentuk kekerasan akibat bentrok dengan pihak kepolisian. Di sisi lain, pihak kepolisian juga dianggap sebagai oknum yang melakukan provokasi, terutama ketika para suporter ini bepergian ke luar kota karena Cardiff City harus menjalani laga tandang. Tidak sedikit dari suporter yang tidak melakukan anarkisme menjadi korban kekerasan polisi.

Penelitian ini dilanjutkan dengan menunjukkan bagaimana fasilitasi dan dialog menjadi pilihan dalam mencegah terjadinya bentrokan antara suporter Cardiff City dan kepolisian. Hanya saja tidak sedikit dari para suporter Cardiff City yang merasa pendekatan dari pihak kepolisian dapat melemahkan posisi suporter dan menguatkan posisi kepolisian. Oleh karena itu, mereka merasa perlu adanya sebuah keseimbangan agar salah satu pihak tidak merasa lebih kuat dari pihak lain.

Pelajaran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa polisi dapat memainkan peran penting dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan masyarakat bila dihadapkan dengan potensi ancaman keamanan dari kelompok suporter. Di Indonesia, pihak kepolisian lebih sering mengambil jalan aman yakni dengan melarang atau membatasi pergerakan kelompok suporter sepakbola, padahal belum tentu kelompok suporter tersebut akan melakukan tindak kekerasan. Oleh karenanya, pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat seharusnya melakukan pendekatan personal kepada para kelompok suporter secara berkala sebagai bentuk mengayomi masyarakat.

Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian

No	Judul & Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	Violent Pasts: Collective Memory and Football Hooliganism Anthony King (2001)	Membahas tentang bagaimana pengalaman di masa lalu yang dialami sebuah kelompok dapat menjadi acuan aksi di masa depan bila telah menjadi sebuah ingatan bersama (<i>collective memory</i>)	Penelitian ini menjelaskan bahwa ingatan bersama (<i>collective memory</i>) menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, sedangkan peneliti menganggap hal tersebut merupakan faktor pemercepat konflik yang telah ada dan bukan sebagai sumber permasalahan
2	Socio-educational work with football fans in Germany: principles, practice and conflicts	Membahas tentang mencari solusi dalam mengurangi kekerasan oleh kelompok suporter	Penelitian ini membahas mengenai kemungkinan dalam

	Martin Winands and Andreas Grau (2016)	sepakbola melalui metode pendidikan jangka panjang	mengembangkan <i>socio-educational fan work</i> di Jerman yang berfokus pada peran <i>fan projects</i> , sedangkan peneliti membahasnya untuk kelompok suporter sepakbola di Indonesia
3	Fans, Racism and British Football in the 21st Century: The Existence of a 'Colour-Blind' Ideology Jamie Cleland & Ellis Cashmore (2014)	Membahas mengenai solusi dalam mengurangi konflik antar kelompok suporter dengan rencana jangka panjang dan pendek	Fokus penelitian ini adalah tentang rasisme di kelompok suporter, sedangkan peneliti melihat bahwa rasisme bukanlah faktor utama penyebab konflik antar kelompok suporter

4	<p>Keeping the Peace: Social Identity, Procedural Justice and the Policing of Football</p> <p>Clifford Stott, James Hoggett and Geoff Pearson (2012)</p>	<p>Membahas mengenai perilaku suporter sepakbola garis keras (<i>hooligan</i>) dengan fokus kepada satu kelompok suporter</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku kelompok suporter dan kebijakan apa yang seharusnya dibuat oleh kepolisian untuk mengendalikan mereka, sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana cara kelompok suporter dalam mengurangi tindakan kekerasan oleh kelompoknya sendiri</p>
---	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

